

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(Audited)**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER
(UAKPA)**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jember, 03 Mei 2024
Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Nendro



DAFTAR ISI

	Hal
i. Kata Pengantar	2
ii. Daftar Isi	3
iii. Pernyataan Tanggung Jawab	5
iv. Ringkasan Laporan Keuangan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	x

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

*JALAN SLAMET RIYADI NO. 344A, PATRANG, JEMBER
TELEPON (0331) 428758; FAKSIMILE (0331) 428760; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jember, 03 Mei 2024

Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Nendro



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6,663,332,518 mencapai 112 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5,957,706,000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2,095,519,920 atau mencapai 91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,293,823,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp24,025,404,484 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp75,356,660 dan Aset Tetap (netto) sebesar Rp23,950,047,824.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp57,405,235 dan Rp23,967,999,249.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6,670,559,671, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2,420,446,805, sehingga terdapat Surplus dari

Kegiatan Operasional senilai Rp4,250,112,866. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp654,000) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4,249,458,866.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp24,093,082,825 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4,249,458,866 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp654,000 serta ditambah Lain-lain sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp4,375,196,442), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp23,967,999,249.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% thd Angg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.957.706.000	6.663.332.518	111,84	8.024.654.257
JUMLAH PENDAPATAN		5.957.706.000	6.663.332.518	111,84	8.024.654.257
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.156.906.000	1.970.422.250	91,35	1.806.951.330
Belanja Modal	B.5	136.917.000	125.097.670	91,37	-
JUMLAH BELANJA		2.293.823.000	2.095.519.920	91,35	1.806.951.330

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER**
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2023

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1	5.153	-
kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	35.893.417	12.502.900
Persediaan	C.3	39.458.090	42.275.850
Jumlah Aset Lancar		75.356.660	54.778.750
ASET TETAP			
Tanah	C.4	15.791.512.000	15.791.512.000
Peralatan dan Mesin	C.5	4.972.829.305	4.674.131.117
Gedung dan Bangunan	C.6	9.268.771.550	9.232.363.550
Aset Tetap Lainnya	C.7	5.365.680	5.365.680
Akumulasi Penyusutan	C.8	(6.088.430.711)	(5.624.475.609)
Jumlah Aset Tetap		23.950.047.824	24.078.896.738
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	54.712.190	54.712.190
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(54.712.190)	(54.712.190)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.025.404.484	24.133.675.488
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	51.386.902	27.352.330
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	6.018.333	13.240.333
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.405.235	40.592.663
JUMLAH KEWAJIBAN		57.405.235	40.592.663
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	23.967.999.249	24.093.082.825
JUMLAH EKUITAS		23.967.999.249	24.093.082.825
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.025.404.484	24.133.675.488

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.670.559.671	7.922.890.941
JUMLAH PENDAPATAN		6.670.559.671	7.922.890.941
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	40.717.360	48.655.210
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.219.065.915	1.194.229.676
Beban Pemeliharaan	D.4	311.840.832	277.974.131
Beban Perjalanan Dinas	D.5	402.259.958	234.297.926
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	446.562.740	472.970.090
JUMLAH BEBAN		2.420.446.805	2.228.127.033
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		4.250.112.866	5.694.763.908
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	108.653.776
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	(654.000)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(654.000)	108.653.776
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		4.249.458.866	5.803.417.684
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.10	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		4.249.458.866	5.803.417.684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	24.093.082.825	24.439.888.491
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	4.249.458.866	5.769.544.533
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	654.000	697.728
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	654.000	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	879.102
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	(181.374)
JUMLAH		654.000	697.728
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(4.375.196.442)	(6.117.047.927)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(125.083.576)	(346.805.666)
EKUITAS AKHIR	E.5	23.967.999.249	24.093.082.825

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pagu awal sebesar Rp2.293.823.000 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp2.293.823.000. Revisi DIPA yang dilakukan selama periode TA 2023 sebanyak enam kali, yaitu sebagai berikut :

1. Revisi pertama dilaksanakan tanggal 15 Februari 2023 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
2. Revisi kedua dilaksanakan tanggal 04 April 2023 dengan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
3. Revisi ketiga dilaksanakan tanggal 16 Mei 2023 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim
4. Revisi ketiga dilaksanakan tanggal 10 Juli 2023 dengan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
5. Revisi ketiga dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2023 dengan Pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
6. Revisi ketiga dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2023 dengan Pengesahan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim

Tabel B.1. Tabel Anggaran Awal dan Revisi Anggaran TA
2023

Uraian	2023		KENAIKAN / PENURUNAN
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.957.706.000	6.663.332.518	0,12
Jumlah Pendapatan	5.957.706.000	6.663.332.518	
Belanja			
Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang	2.156.906.000	1.970.422.250	-8,65%
Belanja Modal	136.917.000	125.097.670	-8,63%
Jumlah Belanja	2.293.823.000	2.095.519.920	

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja barang pada belanja barang non operasional lainnya.

Realisasi

Pendapatan

Rp6,663,332,518

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6,663,332,518 atau mencapai 111,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5,957,706,000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.957.706.000	6.663.332.518	111,84
Jumlah	5.957.706.000	6.663.332.518	-

Jika dibandingkan nilai nominalnya, maka realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 16,96 persen dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022.

Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.663.332.518	8.024.654.257	(16,96)
Jumlah	6.663.332.518	8.024.654.257	(16,96)

Realisasi

Belanja Negara

Rp2,095,519,920

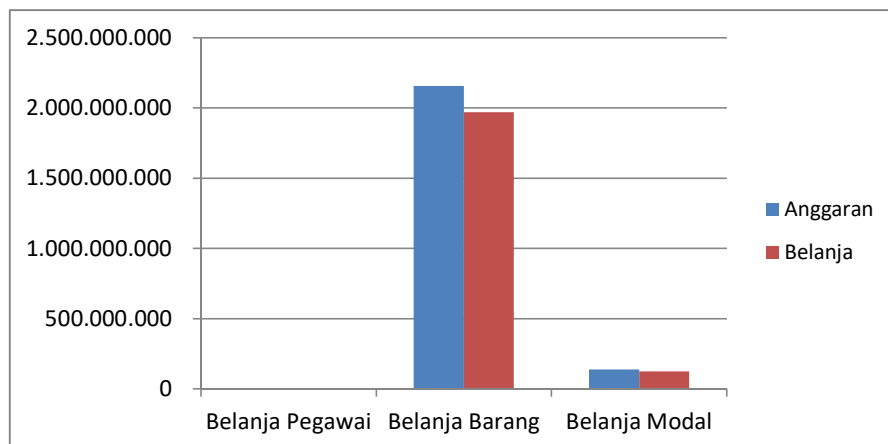
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp2,095,519,920 atau 91,35 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2,293,823,000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	2.156.906.000	1.970.422.250	91,35
Belanja Modal	136.917.000	125.097.670	-
Jumlah	2.293.823.000	2.095.519.920	91,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,97 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

*Tabel B.5. Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.970.422.250	1.806.951.330	9,05
Belanja Modal	125.097.670	-	#DIV/0!
Jumlah	2.095.519.920	1.806.951.330	15,97

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp 0

Tidak terdapat alokasi belanja 51 atau belanja pegawai pada DIPA Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember pada periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Hal ini dikarenakan belanja 51 telah ditetapkan terpusat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp1,970,422,25

0

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,970,422,250 dan Rp1,806,951,330. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,05 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

*Tabel B.7. Perbandingan Belanja Barang
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	2023	2022	Naik / (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.015.376.610	1.068.196.951	(4,94)
Belanja Barang Non Operasional	15.004.000	12.338.000	21,61
Belanja Barang Persediaan	37.899.600	50.926.200	(25,58)
Belanja Jasa	188.041.250	165.044.281	13,93
Belanja Pemeliharaan	311.840.832	297.265.176	4,90
Belanja Perjalanan Dinas	402.259.958	213.180.722	88,69
Realisasi Belanja Bruto	1.970.422.250	1.806.951.330	9,05
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	
Realisasi Belanja Netto	1.970.422.250	1.806.951.330	9,05

Terdapat alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 pada semester I TA 2023 sebesar Rp19,057,416. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp19,057,416.

*Tabel B.8. Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi
COVID-19*

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional	19.057.416	19.057.416	100,00%
	Jumlah	19.057.416	19.057.416	100,00%

*Belanja Modal
Rp125,097,670*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp125,097,670 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan pada TA 2022 tidak terdapat alokasi pagu

belanja modal (53), sedangkan pada TA 2023 ada alokasi belanja modal (53).

*B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.689.670	-	100%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.408.000	-	100%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0%
Belanja Modal Lainnya	-	-	0%
Belanja Modal BLU	-	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	125.097.670	-	100%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	125.097.670	0	100%

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 adalah sebesar Rp88,689,670, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi pagu belanja modal (53) di Tahun Anggaran 2022.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 adalah sebesar Rp36,408,000, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi pagu belanja modal (53) di Tahun Anggaran 20232.

*Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	36.408.000	0	100%
Peralatan dan Mesin	88.689.670	0	100%
Jumlah Belanja Kotor	125.097.670	0	100%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	125.097.670	0	100%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Tabel C.1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan TA 2022*

Keterangan	2023	2022
Uang Tunai	-	-
Bank BRI	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM GU kan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Tabel C.2. Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	2023	2022
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp39,458,090

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp39,458,090 dan Rp42,275,850. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.3. Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	39.458.090	42.275.850
Jumlah	39.458.090	42.275.850

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp15,791,512,000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,791,512,000 dan Rp15,791,512,000. Ada pun nilai tanah TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.4. Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.791.512.000
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2023	15.791.512.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5. Rincian Tanah

No	Luas (m ²)	Uraian	Nilai
1	3.388	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	7.768.486.000
2	2.500	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.023.026.000
Jumlah			15.791.512.000

*Peralatan dan Mesin
Rp4,972,829,305*

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4,972,829,305 dan Rp4,674,131,117. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.6. Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.674.131.117
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer masuk	298.698.188
Koreksi pencatatan	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2023	4.972.829.305
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-4.342.568.911
Nilai Buku per 31 Desember 2023	630.260.394

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp9,268,771,550*

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp9,268,771,550 dan Rp9,232,363,550. Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.7. Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.232.363.550
Mutasi tambah:	36.408.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	9.268.771.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.281.906.698)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.986.864.852

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp5,365,680*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp5,365,680 dan Rp5,365,680.

Aset tetap tersebut berupa Monografi, buku lainnya, lukisan kanvas dan alat musik. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap*

Rp(6,088,430,711)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(6,088,430,711) dan Rp(5,624,475,609).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.9 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.972.829.305	4.342.568.911	630.260.394
2	Gedung dan Bangunan	9.268.771.550	1.281.906.698	7.986.864.852
3	Aset Tetap Lainnya	5.365.680	0	5.365.680
Akumulasi Penyusutan		14.246.966.535	5.624.475.609	8.622.490.926

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0*

C.10. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Tabel C.10. Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
TA 2023 dan TA 2022*

No	Debitur	2023	2022
1	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Lain-Lain
Rp54,712,190*

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp54,712,190 dan Rp54,712,190. Aset Lain-lain

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.11. Nilai Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2022	54.712.190
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	54.712.190
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	(54.712.190)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
/ Amortisasi Aset
Lainnya Rp(54,712,190)*

C.13 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(54,712,190) dan Rp(54,712,190). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel C.12. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	54.712.190	54.712.190	-
Jumlah	54.712.190	54.712.190	-

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp51,386,902*

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp51,386,902 dan Rp27,352,330. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.13. Rincian Utang kepada Pihak ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15.493.485	Tagihan Listrik dan Telepon bulan Desember 2023
Dana Pihak Ketiga	35.893.417	Dana Pihak Ketiga
Total	51.386.902	

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp6,018,333*

C.15 Pendapatan Diterima Di Muka

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6,018,333 dan Rp13,240,333. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang diterima dari pihak ketiga yang telah diterima di muka.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.16 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja.

Ekuitas

Rp23,967,999,249

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23,967,999,249 dan Rp24,093,082,825 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp6,670,559,671

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6,670,559,671 dan Rp7,922,709,567.

Beban Pegawai

Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai

Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0%
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	0	0	0%
Beban Uang Makan	0	0	0%
Beban Uang Lembur	0	0	0%
Pengembalian Beban Gaji	0	0	0%
Pengembalian Beban Tunjangan-tunjangan PNS	0	0	0%
Jumlah	0	0	0%

*Beban
Persediaan
Rp40,717,360*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp40,717,360 dan Rp48,655,210. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	40.717.360	48.655.210	-16,31%
Jumlah Beban Persediaan	40.717.360	48.655.210	-16,31%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1,219,065,91
5*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,219,065,915 dan Rp1,194,229,676. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban khusus penanganan Pandemi COVID-19 ada pada akun Belanja Barang Operasional dengan pagu Rp19.058.000 dan telah terealisasi sebesar Rp19.057.416.

Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan Pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM GUP, sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi. Ada pun belanja dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 yang telah direalisasikan menggunakan akun-akun lama terdiri atas :

1. SPM Nomor 0006 tanggal 09 Februari 2023 berupa belanja masker sebesar Rp573,000 handsanitizer, vitamin sebesar Rp2,699,400
2. SPM Nomor 0034 tanggal 24 Maret 2023 berupa belanja multivitamin sebesar Rp3,466,500
3. SPM Nomor 0051 tanggal 13 April 2023 berupa belanja madu sebesar Rp2,208,000
4. SPM Nomor 0053 tanggal 27 April 2023 berupa belanja handsanitizer dan susu sebesar Rp1,317,100 dan suplemen sebesar Rp483,216
5. SPM Nomor 0059 tanggal 22 Mei 2023 berupa belanja pembelian masker sebesar Rp1,562,980
6. SPM Nomor 0074 tanggal 12 Juni 2023 berupa pembelian madu sebesar Rp1,455,700 dan multivitamin sebesar Rp5,291,520

Beban

Pemeliharaan

Rp311,840,832

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp311,840,832 dan Rp277,974,131. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp402,259,958*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp402,259,958 dan Rp234,297,926. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp446,562,740*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp446,562,740 dan Rp472,970,090. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
(Rp654,000)*

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022 sebesar (Rp654,000) dan Rp108,653,776.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24,093,082,825

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24,093,082,825 dan Rp24,439,888,491.

Surplus/Defisit

LO

Rp4,249,458,866

E.2 Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4,249,458,866 dan Rp5,769,363,159. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Penyesuaian

Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp654,000

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp654,000 dan Rp0.

Selisih

Revaluasi Aset

Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(4,375,196,4
42)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(4,375,196,442) dan Rp(6,117,047,927). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Ekuitas Akhir
Rp23,967,999,249*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23,967,999,249 dan Rp24,093,082,825.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Tidak ada.

F. 2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada.

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. NERACA
3. LAPORAN OPERASIONAL
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5. NERACA PERCOBAAN AKRUAL
6. LRA BELANJA MENURUT AKUN
7. LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN

